

PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019 – 2024



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jalan. Raya Hajimena Kecamatan Natar Lampung Selatan
Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Puji syukur Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung atas izin dan rahmat dari Allah SWT telah dapat menyelesaikan Rencana Strategis Tahun 2020–2024 dengan tepat pada waktunya. Rencana Startegis merupakan perencanaan 5 (lima) tahun kedepan yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, serta target kinerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung. Rencana Strategis ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis yang disusun bertujuan untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pola dasar pembangunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan pengembangan sumberdaya Aparatur disektor pendidikan dan pelatihan telah mengalami perubahan, saat ini sasaran pengembangan kompetensi mengalami perubahan, tidak hanya berdimensi *knowledge, skill dan attitude*, namun dikaitkan juga dengan posisi ASN sebagai sebuah profesi, bukan lagi ASN sebagai sebuah Pekerjaan. Artinya, setiap ASN haruslah profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik dan perekat pemersatu bangsa. Untuk memenuhi standar

kompetensi dan profesionalisme ASN, maka pengembangan kompetensi ASN adalah hak, minimal 20 Jam Pembelajaran 1 (satu) tahun sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017.

Akhirnya, semoga Rencana Strategis yang telah disusun ini mendapat dukungan dari semua pihak dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahun demi tahun serta memberi manfaat bagi pembangunan di Provinsi Lampung. Saran dan kritik yang disampaikan dari Bapak/Ibu/Saudara dalam kerangka perbaikan dan penyempurnaan dokumen ini sangat Kami nantikan serta masukan yang diberikan akan Kami akomodir secara proporsional. Terimakasih.

Hajimena,

2021

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**



Dr. Hi. SENEN MUSTAKIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680602 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPSDM Provinsi Lampung	8
2.2. Sumber Daya BPSDM Provinsi Lampung	15
2.3. Kinerja Pelayanan BPSDM Provinsi Lampung Tahun 2016	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPSDM Provinsi Lampung.....	48
III. PERMASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPSDM Provinsi Lampung	50
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	51
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota	53
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.....	55
IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran BPSDM Provinsi Lampung.....	57
V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	61
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	63
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	72
VIII. PENUTUP.....	72

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang dalam bidang pengembangan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan. Tidak hanya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan saja, namun mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut juga sangat penting dijalankan agar tercipta SDM aparatur yang profesional. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024 yaitu membenahi dan meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional dalam pembangunan dan pelayanan publik, guna melaksanakan Misi 2: Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tidak hanya berfokus pada manajemen karier PNS, pengembangan dan pola karier, mutasi dan promosi namun juga pengembangan kompetensi aparatur. Kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur saat ini semakin penting dan mendesak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat, selain itu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berdinamika, perubahan kebijakan dan paradigma pemerintahan, serta globalisasi, menuntut sumber daya manusia yang profesional. Dengan kapabilitas aparat yang kurang kompeten tentunya tidak akan menjadi daya dorong bagi terciptanya peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik di Provinsi Lampung. Untuk itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung harus mampu memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya aparatur seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang hakiki yaitu peningkatan kemampuan dan kompetensi

aparatur, sebagai agen perubahan dalam era Reformasi Birokrasi. Upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi sumber daya aparatur tersebut dapat dicapai dengan cara tata kelola diklat serta perbaikan sarana dan prasarana diklat.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan di bidang pengembangan kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dituntut mampu, aktif, tanggap dan handal khususnya dalam pengelolaan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur di Provinsi Lampung pada masa 5 (lima) tahun mendatang yang dituangkan dalam **Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024** yang merupakan dokumen perencanaan yang berisi: tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta target kinerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung selama lima tahun (2019-2024) dan menjadi acuan dan arahan bagi jajaran pejabat di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan periode 2019-2024 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, RPJMD mengalami perubahan sebagai hasil dari evaluasi yang dilakukan. Evaluasi RPJMD bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian terhadap target target pembangunan yang telah ditetapkan dengan melakukan pencermatan perkembangan-perkembangan yang terjadi baik pada skala provinsi, nasional bahkan global yang mempengaruhi asumsi-asumsi pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah. Adanya wabah covid-19 mempengaruhi beberapa aspek kehidupan, maka perlu juga dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah (IKU pemda), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (impact) dan tingkat hasil (outcome). Selain itu, evaluasi juga disusun untuk mengukur dan mengetahui apakah ada kebijakan/regulasi pemerintah khususnya yang belum terakomodasi dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung.

Substansi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kerjanya, IKU Perangkat Daerah dan target kerjanya, dan indikator kinerja program.

Dalam kaitannya dengan dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah, Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Perubahan Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Perubahan RPJMD ini serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi. Selanjutnya, Perubahan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah Provinsi Lampung. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun, berdasarkan Renstra PD.

Berdasarkan hal tersebut di atas, BPSDM Provinsi Lampung pun menyusun perubahan Renstra BPSDM Provinsi Lampung 2019-2024 dengan berpedoman kepada perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 diantaranya penyesuaian target indikator tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, perubahan program dan kegiatan lama menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kerjanya, dan IKD yang diampu BPSDM serta target IKU.

1.2. DASAR HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Kepala Lembaga Adminstrasi Negara (LAN) Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diklatpim Tingkat III;
- h. Peraturan Kepala Lembaga Adminstrasi Negara (LAN) Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV;
- i. Peraturan Kepala Lembaga Adminstrasi Negara (LAN) Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diklat Prajabatan Gol III;
- j. Peraturan Kepala Lembaga Adminstrasi Negara (LAN) Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diklat Prajabatan Gol I dan II;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 12 tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;

- l. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019;
- m. Peraturan Gubernur Lampung nomor 92 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud perubahan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah untuk memperbarui dokumen renstra sebelumnya sebagai tindak lanjut evaluasi yang dilakukan terhadap Renstra BPSDM dengan berpedoman kepada perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 guna penyelerasan target IKD dan IKU BPSDM Provinsi Lampung.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah:

- a. Menyelaraskan dokumen perubahan Renstra BPSDM Daerah Provinsi Lampung tahun 2019-2024 dengan perubahan RPJMD Daerah Provinsi Lampung tahun 2019-2024;
- b. Menetapkan perubahan IKU dan IKD serta arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Provinsi Lampung untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang;

- c. Menetapkan perubahan program dan kegiatan serta sub kegiatan pada Renstra BPSDM Daerah Provinsi Lampung tahun 2019-2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah agar menjadi acuan dalam penyusunan renja BPSDM Daerah Provinsi Lampung.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan perubahan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan, serta Sistematika Penyusunan.

II. Gambaran Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dan kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

III. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

Bab ini mengemukakan permasalahan pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra Kementerian/Lembaga, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

IV. Tujuan dan Sasaran

Bab ini memaparkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

V. Strategi dan Kebijakan

Bab ini menyajikan strategi dan kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dalam lima tahun mendatang, sebagai acuan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi Provinsi Lampung: Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera).

VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2024.

VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan tentang kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

VIII. Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan harapan dari Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Lampung

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

A. Tugas Pokok dan Fungsi BPSDMD Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019, BPSDM Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok *”Melaksanakan Pengembangan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia provinsi;
- b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;

- c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
- e. Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang.

Tugas pokok jabatan struktural Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tertuang pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

➤ Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis, rencana, dan program serta penetapan standar/pedoman;
 - b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
 - c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur;
 - e. Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah;
 - f. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

➤ **Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, serta fasilitasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota khususnya Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur provinsi;
 - b. Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan keuangan, serta pelaporan keuangan dan aset;
 - c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;

- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti**

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi teknis Inti.
- (2) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis inti;
 - b. Penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;
 - c. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;
 - d. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;
 - e. Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional**

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi umum dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan konkuren, dan penyelenggara urusan pemerintahan umum, serta jabatan fungsional.
- (2) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, pilihan, dan urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi, serta jabatan fungsional;
 - b. Penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi umum, pilihan, urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi, dan jabatan fungsional;
 - c. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi umum, pilihan, serta urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional;
 - d. Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial**

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan.

- (2) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan;
 - b. Penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan;
 - c. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan;
 - d. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan;
 - e. Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

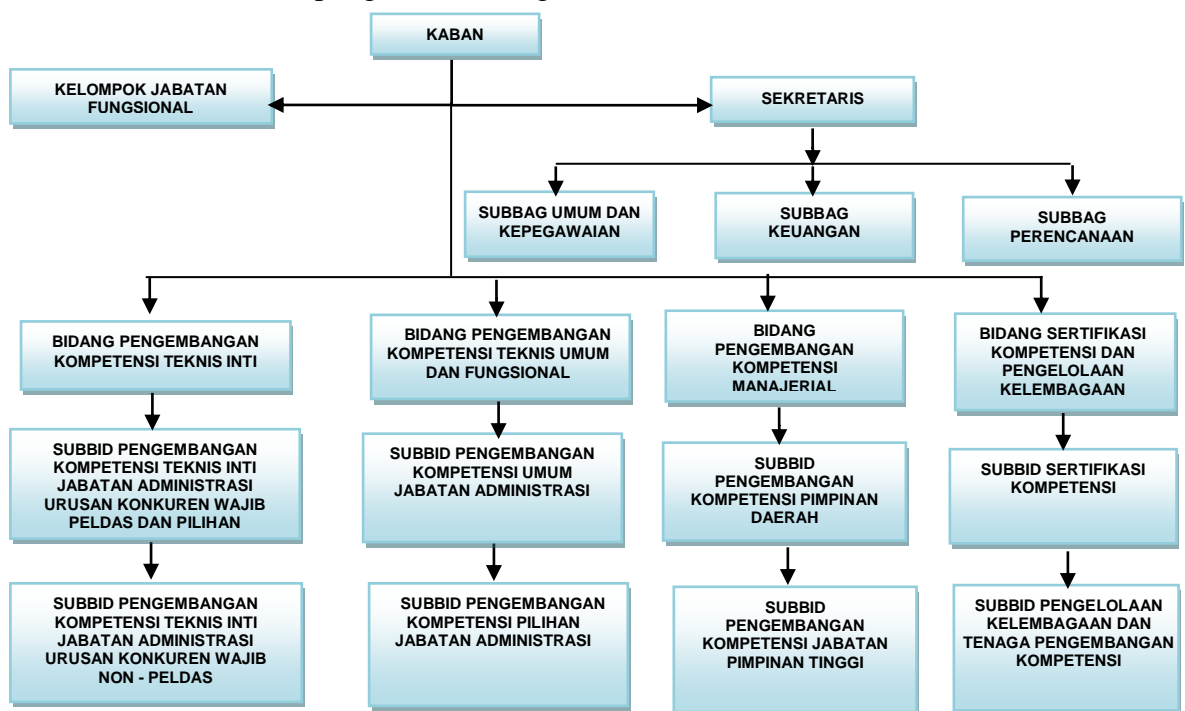
➤ **Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan**

- (1) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sertifikasi kompetensi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, dan kerjasama antara lembaga
- (2) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, dan kerjasama;
- b. Pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri provinsi;
- c. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, dan sumber belajar;
- e. Pelaksanaan kerjasama antar Lembaga;
- f. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerjasama; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.2. Bagan dan Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:



2.2. Sumber Daya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 100 orang yang terdiri dari 88 orang berstatus PNS, dan 12 orang merupakan tenaga PTHL, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 SDM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Berdasarkan Jenjang Pendidikan

	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
PNS	-	31	24	2	12	-	3	72
WI	-	16		-	-	-	-	16
CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-
PTHL	-	-	3	1	6	-	2	12
Jumlah	-	47	27	3	18	-	5	100

Tabel 2.2 SDM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Berdasarkan Golongan

Golongan IV/e	: 5 orang	Golongan IV/d	: 4 orang
Golongan IV/c	: 4 orang	Golongan IV/b	: 6 orang
Golongan IV/a	: 19 orang	Golongan III/d	: 11 orang
Golongan III/c	: 12 orang	Golongan III/b	: 8 orang
Golongan III/a	: 8 orang	Golongan II/d	: 1 orang
Golongan II/c	: 5 orang	Golongan II/b	: 2 orang
Golongan II/a	: - orang	Golongan I/d	: - orang
Golongan I/c	: - orang	Golongan I/b	: 3 orang
Golongan I/a	: - orang		

Tabel 2.3 SDM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Berdasarkan Jabatan Fungsional Widyaiswara

Golongan IV/e	: 4 orang	Golongan IV/d	: 4 orang
Golongan IV/c	: 3 orang	Golongan IV/b	: 2 orang
Golongan IV/a	: 2 orang	Golongan III/d	: 1 orang

2.2.2. Sarana, Prasarana dan Sumber Anggaran

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Propinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Tanah dan Bangunan, yang terdiri dari :

- Luas Tanah = 8,6524 Ha
- Luas Bangunan = 5.548 M²
- Ruang Belajar, 2 Unit
- Ruang Belajar Gunung Seminung terdiri dari 6 kelas
- Ruang Belajar Gunung Way Umpu terdiri dari 1 kelas
- Aula Gunung Krakatau dengan kapasitas ± 500 orang
- Gedung Asrama, 3 unit
- Asrama Gunung Pesagi terdiri dari 42 kamar dengan daya tampung 3 orang per kamar
- Asrama Gunung Tanggang terdiri dari 16 kamar dengan daya tampung 2 orang per kamar
- Asrama Gunung Betung terdiri dari 9 kamar dengan daya tampung 2 orang per kamar
- Asrama Gunung Rajabasa (VIP) terdiri dari 15 kamar dengan daya tampung 2 orang per kamar
- Ruang Perkantoran, 4 unit
- Ruang Makan, 2 unit
- Ruang makan VIP kapsitas 80 orang
- Ruang makan kapasitas 150 orang
- Laboratorium Komputer, 1 unit
- Laboratorium Bahasa, 1 unit
- Ruang Perpustakaan, 1 unit
- Ruang Widyaiswara, 1 unit
- Ruang Foto Copy, 1 unit
- Ruang Musholla, 1 unit
- Ruang Kamar Mandi/WC, 91 unit
- Ruang Gudang, 6 unit

- Ruang Kebugaran, 1 unit
 - Lapangan Voli, 1 unit
 - Lapangan Bulu Tangkis, 1 unit
2. Perangkat Penunjang lainnya :
- Lemari Kantor, 21 buah
 - Lemari peserta, 82 unit
 - Tempat tidur, 200 unit
 - Wireles, 12 unit
 - Sound System, 3 unit
 - Meja Belajar, 450 unit
 - Komputer, 15 unit
 - Papan whiteboard, 11 unit
 - Laptop, 12 unit
 - LCD, 8 unit
 - Genset 30.000 watt, 1 unit
 - Genset 10.000 watt, 1 unit
 - Kursi makan, 120 buah
 - Meja Makan, 20 buah
 - Filling kabinet, 15 buah
 - Meja Kerja, 80 buah
 - Organ, 2 unit
3. Kendaraan Dinas/Operasional :
- Kendaraan Roda Empat (mobil), 3 unit
 - Kendaraan Roda Dua (Motor), 2 unit

Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung yang dijabarkan ke dalam program kerja bersumber dari:

- a) Dana APBD Provinsi Lampung.
- b) Dana APBD Kabupaten/Kota yang disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk Diklat Swadana yang peserta berasal dari Kabupaten/Kota.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

Penetapan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2.3.1 Capaian Kinerja pada Renstra sebelumnya (Tahun 2015 – 2019)

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Lampung telah melakukan beberapa Program dan Kegiatan untuk mencapai kinerja pelayanan perangkat daerah. Realisasi capaian kinerja tahun 2015 - 2019 dapat dilihat sebagaimana berikut Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung (BPSDM) Provinsi Lampung 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi dengan ketentuan predikat minimal memuaskan dan hasil post test minimal 70	70%	75%	80%			74%	86,20%	87,25%			104,63	115,33	109,06		
2.	Jumlah aparatur yang lulus uji kompetensi	-	240	124			-	240	124							
3.	Kualifikasi Akreditasi Lembaga Diklat	B	B	B			B	B	B			100	100	100		
INDIKATOR KINERJA (HASIL EVALUASI SAKIP dan PENAJAMAN IKU)																
1.	Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi dengan ketentuan Prediklat memuaskan				85%	90%				85,26%	100%				100,31	111,11
2.	Persentase penilaian performance tenaga pengajar dan penyelenggara pengembangan Kompetensi minimal baik				90%	100%				90%	100%				100	100

Berdasarkan tabel 2.4 di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja perangkat daerah telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Pada tahun 2015, persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat diklat dengan kualifikasi predikat minimal memuaskan dan hasil post test minimal 70 sebesar **74%** meningkat menjadi **85,26%** di tahun 2017, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari sisi kualitas alumni diklat dari tahun ke tahun. Untuk kualifikasi akreditasi lembaga diklat, nilai yang didapat hingga tahun 2017 adalah B, secara umum akreditasi B dapat dikatakan menunjukkan kondisi yang cukup baik walaupun demikian status akreditasi memberikan kontribusi terhadap kinerja lembaga diklat. Apalagi akreditasi tidak saja bertujuan untuk memberikan penilaian kelayakan lembaga diklat dalam menyelenggarakan suatu program diklat, akan tetapi juga diharapkan dapat memicu lembaga diklat untuk meningkatkan kinerjanya.

Adapun capaian indikator kinerja BPSDM tahun 2018 dan 2019 tercapai melebihi yang ditargetkan. Persentase peserta diklat yang lulus pengembangan kompetensi dengan ketentuan Prediklat memuaskan sebesar 85,26% dan 100% menunjukkan bertambahnya kualitas alumni diklat dari tahun ke tahun. Untuk indikator penilaian *performance* tenaga pengajar dan penyelenggara pengembangan Kompetensi minimal baik masing-masing tercapai 100% yang didapat melalui perhitungan persentase *performance/kinerja* tenaga pengajar dan penyelenggara diklat minimal baik/memuaskan, yang dinilai peserta terhadap keterampilan, kedisiplinan, penguasaan materi, metode diklat dari tenaga pengajar serta kecakapan dari penyelenggara. Hal ini menunjukkan bahwa Sebagian besar peserta diklat puas terhadap layanan yang diberikan.

2.3.2 Capaian Kinerja Pada Renstra 2019 – 2024 di Tahun Pertama (2020)

Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan Indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 2.5 dan Indikator Kinerja Utama BPSDM Provinsi Lampung disajikan pada tabel 2.6

Tabel 2.5 Indikator kinerja daerah BPSDM Provinsi Lampung

Indikator Kinerja Daerah	2020		2021	2022	2023	2024
	Target	Capaian	Target	Target	Target	Target
Persentase Aparatur dan Non Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat Managerial	3.24	0,37	6.24	9.24	12.24	15.24
Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat Teknis Inti	2.88	1,11	5.76	8.64	11.52	14.41
Persentase Aparatur dan Non Aparatur yang Memiliki sertifikat Diklat Teknis Umum dan Fungsional	2.88	3,64	5.76	8.64	11.52	14.41

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama BPSDM Provinsi Lampung

Indikator Kinerja Utama	2020		2021		2022	2023	2024
	Target	Capaian	Target	Capaian s.d TW I	Target	Target	Target
Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	20,28%	18,28%	29,34%	19,71%	39,09%	48,84%	59,07%
Nilai Akreditasi	B	B	B	B	A	A	A

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Indikator kinerja daerah dan IKU BPSDM Provinsi Lampung tahun 2020 dan triwulan I tahun 2021 dibawah target yang ditetapkan, hal ini disebabkan antara lain karena adanya Pandemi Covid 19 yang berdampak pada perlambatan perekonomian lokal dan nasional tentunya sangat mempengaruhi capaian kinerja aspek pembangunan. Selain itu juga adanya kebijakan penanganan Covid 19 terutama dari sisi penggunaan anggaran yang terkonsentrasi untuk mendukung kebijakan tersebut akibatnya anggaran perangkat daerah mengalami refocusing dan beberapa target kegiatan tidak tercapai dan tentunya berdampak juga terhadap capaian IKU tahun berikutnya, sehingga pada evaluasi renstra 2019-2024, BPSDM Provinsi Lampung mengajukan perubahan target IKU sebagaimana terlihat pada tabel 2.7

Pemberlakuan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengarah pada penerapan *single codebase* untuk penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja. Dalam Permendagri nomor 90 tahun 2019 memuat program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan urusan yang ditangani oleh masing-masing perangkat daerah dan berlaku seragam untuk setiap daerah, sehingga tidak ada lagi perbedaan nama program/kegiatan/sub kegiatan pada masing-masing daerah.

Perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur tersebut sangatlah signifikan, karena terdapat penambahan sub kegiatan setelah kegiatan, dimana pada penerapan permedagri 13 tahun 2017 hanya terdapat program dan kegiatan saja. Selain itu pada Permendagri nomor 90 tahun 2019 terdapat perubahan nama program, kegiatan dan sub kegiatan yang berbeda jauh dari program dan kegiatan sebelumnya dan penggabungan beberapa kegiatan, tentunya mengharuskan dilakukan perubahan renstra PD termasuk BPSDM Provinsi Lampung yang mengalami penggabungan dan perubahan nama program dan kegiatan.

Sebagaimana diketahui bahwa Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Merujuk penjelasan tersebut, maka BPSDM Provinsi Lampung memutuskan untuk merubah indikator kinerja daerah atas pertimbangan bahwa program dan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja daerah sebelumnya sudah tidak berlaku dan relevan lagi akibat penetapan Permendagri 90 tahun 2019 yang sudah dilaksanakan pada periode 2021 ini dan untuk memudahkan formulasi perhitungan indikator kinerja daerah pada tahun 2021 s.d 2024 maka BPSDM Provinsi Lampung menetapkan indikator kinerja daerah sesuai dengan IKU BPSDM. Rencana perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini:

Tabel 2.7 Rencana Perubahan Indikator Kinerja Daerah dan Target IKU BPSDM Provinsi Lampung tahun 2019-2024

Indikator Kinerja Daerah Lama	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian	Target	Rencana Revisi Target	Target	Rencana Revisi Target	Target	Rencana Revisi Target	Target	Rencana Revisi Target
Data awal Indikator Kinerja Daerah yang terdapat pada RPJMD 2019-2024										
Persentase Aparatur dan Non Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat Managerial	3.24	0,37	6.24		9.24		12.24		15.24	
Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat Teknis Inti	2.88	1,11	5.76		8.64		11.52		14.41	
Persentase Aparatur dan Non Aparatur yang Memiliki sertifikat Diklat Teknis Umum dan Fungsional	2.88	3,64	5.76		8.64		11.52		14.41	
Rencana Perubahan Indikator Kinerja Daerah Baru Sesuai IKU Renstra BPSDM 2019-2024										
Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	20,28%	18,28%	29,34%	25.34%	39,09%	32.39%	48,84%	38.30%	59,07%	48.40%
Nilai Akreditasi	B	B	B		A		A		A	

Jumlah aparatur yang telah terlayani diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Lampung dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8 Data Aparatur Yang Lulus Diklat Tahun 2017 - 2020

No.	Jenis Diklat	Tahun							
		2017		2018		2019		2020	
		Prov	Kab/ Kota	Prov	Kab/ Kota	Prov	Kab/ Kota	Prov	Kab/ Kota
1.	Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	80	80	74	430	294	2114	58	713
2.	Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	120	-	60	-	150		176	86
3.	Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Fungsional	214	-	60	-	370		577	82
	Total	414	80	194	430	814	2114	811	881

Sumber : BPSDM Provinsi Lampung tahun 2020

Jika ditinjau dari jumlah lulusan diklat, maka didapat data bahwa hingga tahun 2020, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Lampung telah meluluskan sebanyak 2.899 orang aparatur Provinsi Lampung dari total 15.861 orang pegawai pemerintah Provinsi Lampung. Dari segi kuantitas terlihat bahwa 18,28% aparatur telah bersertifikasi diklat, namun data tersebut belum bisa menunjukkan aparatur mana saja yang sudah terlayani dan yang belum pernah mengikuti diklat sama sekali. Sedangkan sisanya terdapat 81,72% aparatur atau sebesar 12.962 orang aparatur yang belum terlayani diklat/pengembangan kompetensi baik pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan, teknis inti maupun teknis umum dan fungsional. oleh sebab itu kelompok aparatur tersebut menjadi prioritas sasaran kinerja pelayanan BPSDM Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun kedepan. Untuk kegiatan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan, berdasarkan data yang berhasil dihimpun kebutuhan diklat kepemimpinan sebagaimana terlihat pada tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9 Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Manajerial Aparatur Provinsi Lampung s.d 2024

Uraian	Jabatan				Jumlah
	Pejabat Tinggi Pratama (Ess II.a)	Pejabat Administrator (Ess III.a)	Pejabat Pelaksana (Ess IV.a)	CPNS	
Jumlah Pegawai	46	308	895	416	1.695
Belum Diklatpim II	24				24
Belum Diklatpim III		138			126
Belum Diklatpim IV			443		455
Belum Latsar/ Prajabatan				416	416

Sumber : BKD Provinsi Lampung tahun 2021

Kebutuhan pengembangan kompetensi/diklat untuk pengembangan kompetensi teknis inti serta teknis umum dan fungsional sampai tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.10 Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti, Teknis Umum dan Fungsional Provinsi Lampung tahun 2019-2024

KEBUTUHAN/NAMA DIKLAT	SASARAN	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
1. Diklat Pemetaan Data Spasial 2. Diklat Peningkatan Mutu Produk Perikanan 3. Diklat Cara Budidaya Ikan yang Baik 4. Diklat Cek Fisik Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Ikan	SDM Aparatur Pem prov Lampung	20 orang 50 orang 50 orang 30 orang	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
1. Diklat Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih 2. Diklat Uji Mutu benih 3. Diklat Pemandu Lapang Pengendalian Hama Terpadu (HPT) 4. Diklat Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 5. Diklat Penyuluh Pertanian	SDM Aparatur Pemprov Lampung Penyuluh pertanian	30 orang 30 orang 60 orang 60 orang 450 Orang	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
1. Diklat Dasar PBT dan Calon PBT Perkebunan Terampil 2. Diklat Dasar PBT dan Calon PBT Perkebunan Ahli 3. Diklat Teknik Peramalan OPT Perkebunan 4. Diklat Dasar Pengawas Mutu Hasil Pertanian Bagi Fungsional PMHP dan Calon PMHP	SDM Aparatur Pemprov Lampung	10 orang 10 orang 20 orang 20 orang	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
1. Diklat Pengolahan Hasil Ternak 2. Diklat Penerapan Sanitasi untuk Pelaku Usaha 3. Diklat Pengawas Obat Hewan 4. Diklat Juru Sembelih Halal	SDM Aparatur Pemprov Lampung	10 orang 10 orang 10 orang 10 orang	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
1. Diklat Penyusunan Pola Karir 2. Diklat Penyusunan SOP 3. Diklat Teknis/Pembentukan Penyuluh Kehutanan 4. Diklat Pembentukan Polisi Kehutanan	SDM Aparatur Pemprov Lampung	10 orang 30 orang 153 orang 170 orang	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
1. Diklat Teknologi Informasi 2. Diklat Manajemen Sekretariat	SDM Aparatur Pemprov Lampung	3 orang 2 orang	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
1. Diklat Analisis Kebijakan Ekonomi (Makro dan Mikro) 2. Diklat Tata Kelola BUMD 3. Diklat Perencanaan dan Penganggaran	SDM Aparatur Pemprov Lampung	3 orang 3 orang 2 orang	Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung

KEBUTUHAN/NAMA DIKLAT	SASARAN	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
4. Diklat Pertanggungjawaban Keuangan		3 orang	
1. Diklat Penghitungan Angka Kredit dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru SMA/SMK 2. Diklat Penyusunan Perencanaan Program Pendidikan 3. Diklat Peningkatan Mutu Guru SMA 4. Diklat e-Perpustakaan Sekolah 5. Diklat Penata Usahaan Aset Sekolah 6. Diklat Pengelolaan Keuangan Sekolah	Pengelola perpustakaan SMA/SMK Pengelola Aset Sekolah Pengelola Keuangan Sekolah	100 orang 5 orang 300 orang 492 orang 492 orang 492 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
1. Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset BLUD 2. Penyusunan <i>Provincial Health Account</i> (PHA) dan <i>District Health Account</i> 3. Diklat Geospasial (<i>Geographic Information System</i>) 4. Diklat Manajemen Kepegawaian 5. Diklat Sistem Manajemen Puskesmas	SDM Aparatur Dinas Kesehatan Pemerintah Kab/Kota	6 orang 4 orang 6 orang 5 orang 299 Orang	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
1. Diklat Pekerja Sosial yang Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di dalam Panti (Disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum) 2. Diklat Pekerja Sosial yang Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di luar Panti (bencana alam, bencana sosial, program keluarga harapan, pengangkatan anak, kekerasan dalam rumah tangga) 3. Diklat Penilaian Angka Kredit Bagi Pejabat Fungsional Pekerja Sosial		28 orang 24 orang 7 orang	Dinas Sosial Provinsi Lampung
1. Diklat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Tim Driver (Bappeda, Dinas PPPA, Inspektorat dan Keuangan) Kab/Kota Se-Provinsi Lampung 2. Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Se-Provinsi Lampung 3. Diklat Manajemen Kasus bagi Aparatur Sipil Negara dan Tim Profesi UPTD PPA Se-Provinsi Lampung		60 orang 75 orang 135 orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

KEBUTUHAN/NAMA DIKLAT	SASARAN	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
4. Diklat Penanganan Satu Pintu Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak		50 orang	
1. Diklat Calon Pejabat Fungsional Administrasi <i>Database</i> Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Diklat Layanan Administrasi Kependudukan		32 orang 32 orang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
1. Diklat Pengelolaan Keuangan Desa 2. Diklat Penyusunan Produk Hukum dan Tata Naskah Desa 3. Diklat Manajemen Pemerintahan Desa 4. Diklat Penguatan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 5. Diklat Teknis Pengelolaan Administrasi Desa berbasis Digital		2.435 orang 2.435 orang 2.435 orang 103 orang 30 SDM Aparatur Prov. Lampung dan 30 SDM Kab/kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Transmigrasi Provinsi Lampung
1. Diklat Penjurusan (Terampil, Mahir dan Ahli) bagi Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja, Terampil 31 orang, Mahir 3 orang dan Ahli 2. Diklat Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja 3. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 4. Diklat Penyusunan <i>Standar Operasional Prosedur (SOP)</i> 5. Diklat Strategi Relokasi Pasar dan PKL	PNS Satpol PP dilingkungan Pemprov & Kab/Kota	16 orang 10 orang 5 orang 6 orang 150 Orang	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
1. Diklat Manajemen dan Kawasan Industri, 2. Diklat Sertifikasi Mutu Barang 3. Diklat Komoditas Pasar Lelang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri		20 Orang 20 Orang 30 Orang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
1. Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota 2. Diklat Teknik Komunikasi untuk Widyaiswara 3. Diklat Teknik Penyusunan Presentasi		50 Orang 10 Orang 10 Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung

KEBUTUHAN/NAMA DIKLAT	SASARAN	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
4. Diklat Teknologi Informatika 5. Diklat Desain Produk Bagi Umum 6. Diklat Penyuluhan Koperasi 8. Diklat Jabatan Fungsional		10 orang 40 orang 20 orang/Th 8 orang	
1. Diklat Penggunaan Aplikasi Pelayanan Perijinan 2. Diklat Pelayanan Publik 3. Diklat Peningkatan Pengembangan Multimedia 4. Diklat Pengembangan SDM untuk Pengembangan Peluang dan Potensi SDA		50 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Lampung
1. Diklat Pembentukan Auditor Ahli Pertama 2. Diklat Pembentukan Audiwan Ahli Pertama 3. Diklat Audit Investigasi 4. Diklat Audit dengan tujuan tertentu 5. Diklat Manajemen Resiko 6. Diklat Pembentukan P2UPD		5 orang 5 orang 20 orang 20 orang 20 orang 124 Orang	Inspektorat Provinsi Lampung
1. Diklat Penyusunan Kebijakan rencana Pembangunan 2. Diklat Identifikasi Isu Strategis Daerah 3. Diklat Monev Pelaksanaan Rencana Pembangunan 4. Diklat Legitimasi Rencana Pembangunan		20 orang 20 orang 20 orang 20 orang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
1. Diklat Pejabat Pembuat Komitmen 2. Diklat Manajemen ASN 3. Diklat Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan 4. Diklat Analisis Jabatan 5. Diklat Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai 6. Diklat Penegakan Disiplin 7. Diklat Revolusi Mental		1 orang 15 orang 6 orang 10 orang 5 orang 5 orang 850 Orang 321 Orang	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
1. Diklat Pelopor Revolusi Mental 2. Diklat Perencanaan Kompetensi Multimedia 3. Uji Kompetensi bagi penyuluh pertanian 4. Uji Kompetensi bagi pejabat Pengawas dan		120 orang 120 orang 200 orang 260 orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung

KEBUTUHAN/NAMA DIKLAT	SASARAN	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
Administrator 5. Diklat Manajemen strategi pengembangan inovasi daerah berbasis sektor unggulan 6. Diklat Pengembangan Pariwisata 7. Diklat PIM III, PIM IV, LATSAR dan Prajabatan		60 orang	
1. Diklat Fungsional Peneliti 2. Diklat Fungsional SDM 3. Diklat Fungsional Analisis Kebijakan 4. Diklat Fungsional Metodologi penelitian 5. Diklat Fungsional Penulisan Jurnal Ilmiah		16 orang 8 orang 8 orang 2 orang 2 orang	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
1. Diklat Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Perpustakaan Desa 2. Diklat Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Arsip Desa 3. Diklat Peningkatan Kualitas Kepala Perpustakaan Sekolah Menengah Atas 4. Diklat Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Perpustakaan OPD 5. Diklat Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Arsip OPD		30 orang 30 orang 40 orang 40 orang 40 orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
Diklat Perencanaan Daerah		2 orang	Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
1. Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 2. Diklat Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 3. Diklat Peningkatan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen 4. Pelatihan/Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa		36 orang 50 orang 50 orang 220 orang	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Lampung
1. Diklat Penilai Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup 2. Diklat Validator/Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup 3. Diklat Pendalaman SNI		30 Orang 30 Orang 30 orang	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

KEBUTUHAN/NAMA DIKLAT	SASARAN	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
1. Diklat Pengelolaan Kepelabuhan 2. Diklat Pengelolaan Terminal		30 orang 30 orang	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
1. Bimtek Keterampilan Penyuluh/Petugas Penanganan Bencana 2. Diklat Petugas Konseling Pasca Bencana 3. Diklat Manajemen Logistik Bencana Alam	SDM Aparatur Dinas BPBD Pemerintah Provinsi & Kab/Kota	60 orang 60 orang 150 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
Diklat SDM Sadar Kepariwisata	Kelompok Sadar Wisata	190 Pokdarwis	Dinas Pariwisata
Diklat bidang Teknologi Infomasi dan komunikasi		60 SDM Aparatur Prov. Lampung dan Kab/kota	Dinas Kominfo
Diklat Penyusunan RENSTRA	Pejabat Pengawas dan Pelaksana Pemprov Lampung	102 SDM Aparatur (51 OPD X 2 orang)	OPD di lingkungan Pemprov Lampung
Diklat perencanaan dan penganggaran (integrasi e-planning & e-budgeting)	Pejabat Pengawas dan Pelaksana Pemprov Lampung	102 SDM Aparatur (Orang)	OPD di lingkungan Pemprov Lampung
Diklat perencanaan , monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja	Pejabat Pengawas dan Pelaksana Pemprov Lampung	102 SDM Aparatur (51 OPD X 2 Orang)	OPD di lingkungan Pemprov Lampung
Diklat Keuangan	2 ASN terdiri Pejabat Pengawas dan Pelaksana	102 SDM Aparatur (51 OPD X 2 Orang)	OPD di lingkungan Pemprov Lampung
Diklat Pengelolaan Aset	2 ASN terdiri Pejabat Pengawas dan Pelaksana	102 SDM Aparatur (51 OPD X 2 Orang)	OPD di lingkungan Pemprov Lampung
Diklat Perpajakan	2 ASN terdiri Pejabat Pengawas dan Pelaksana	102 SDM Aparatur (51 OPD X 2 Orang)	OPD di lingkungan Pemprov Lampung
Diklat Manajemen Kepegawaian	2 ASN terdiri Pejabat Pengawas dan Pelaksana	102 SDM Aparatur (51 OPD X 2 Orang)	OPD di lingkungan Pemprov Lampung
Diklat LPPD/SAKIP	2 ASN terdiri Pejabat Pengawas dan Pelaksana	102 SDM Aparatur (51 OPD X 2 Orang)	OPD di lingkungan Pemprov Lampung
Diklat Manajemen Arsip Digital	2 ASN terdiri Pejabat Pengawas dan Pelaksana	102 SDM Aparatur (51 OPD X 2 Orang)	OPD di lingkungan Pemprov Lampung

Berdasarkan data di atas dan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dimasa pandemic covid 19 ini, maka estimasi pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Target SDM Aparatur Provinsi Lampung yang Memiliki Sertifikat Diklat Pada Tahun 2019-2024

Program	Base Line tahun 2019 (orang)	Target Jumlah SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat (Orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengembangan Kompetensi Teknis		475	480	480	630	780
Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		336	610	629	300	810
Total (n)	2088	811	1090	1109	930	1590
Jumlah Total (n+1)		2899	3989	5098	6028	7618
Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat diklat = (Jumlah SDM aparatur yang memiliki sertifikat diklat dengan predikat memuaskan atau hasil post test minimal 70 s.d tahun berjalan dibagi Jumlah PNS Pemprov Lampung dikali 100%)	12,50%	20,28%	25,34%	32,39%	38,30%	48,40%

Sumber : Bidang Teknis BPSDM Provinsi Lampung tahun 2021

Selanjutnya untuk tingkat capaian kapasitas manajemen diklat selama kurun 2015-2019, beberapa kondisi yang dapat dijelaskan yaitu :

1. Aspek Fungsi Manajemen

- a. **Aspek perencanaan diklat**, dilakukan berdasarkan identifikasi kebutuhan diklat bersama seluruh OPD yang ada di Provinsi Lampung, namun belum mengarah kepada pemetaan kebutuhan diklat

- b. **Aspek pelaksanaan diklat**, sudah dilakukan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan diklat yang berlaku baik dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, maupun kementerian/lembaga terkait.
- c. **Aspek evaluasi diklat**, untuk penyelenggaraan sudah dilakukan evaluasi pelaksanaan, walaupun sebagian besar kegiatan diklat tidak menjalankan evaluasi pasca diklat khususnya pada diklat teknis dan fungsional

2. Aspek Unsur Manajemen

- a. **SDM aparatur BPSDM Provinsi Lampung**, masih terdapat beberapa SDM yang belum mengikuti diklat *ToC/MoT*
- b. **Akreditasi**, saat ini akreditasi BPSDM Provinsi Lampung berkualifikasi **B**. Berdasarkan hasil evaluasi asesor akreditasi, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan diantaranya sarana prasarana, kompetensi widyaiswara dan tenaga penyelenggara
- c. **Sarana prasarana**, BPSDM Provinsi Lampung telah berupaya memenuhi sarana prasarana sesuai standar namun masih terdapat kekurangan karena terbatasnya anggaran. Adapun kondisi sarana kediklatan dan kebutuhan pengembangannya sebagai berikut:

Tabel 2.12 Sarana Prasana Kediklatan

No.	URAIAN	RENCANA KEBUTUHAN (UNIT/BUAH/PAKET)	JUMLAH BARANG/ GEDUNG (UNIT/BUAH/PAKET)	KONDISI
A.	SARANA			
1.	Meja Belajar Bundar	-	40 Buah	BAIK
2.	Meja Belajar	-	100 Buah	BAIK
3.	Kursi Belajar	122 Buah	200 Buah	BAIK
4.	Infocus/LCD	4 Buah	10 Buah	BAIK
5.	Sound System	4 Buah	10 Buah	BAIK
6.	Wi-Fi	8 Paket	5 Paket	BAIK
7.	Teknologi Multimedia	3 Paket	-	-
B.	PRASARANA			
1.	Ruang Kelas	2 Unit	9 Unit	BAIK
2.	Ruang Diskusi	2 Unit	-	-
3.	Aula	-	1 Unit	BAIK
4.	Ruang Seminar	4 Unit	-	-
5.	Ruang Kantor	-	15 Unit	BAIK
6.	Ruang Perpustakaan	-	1 Unit	BAIK
7.	Asrama	1 Unit	4 Unit	BAIK
8.	Ruang Kebugaran/ Fitness	1 Unit	-	-
9.	Unit Kesehatan	-	1 Unit	BAIK
10.	Tempat Ibadah	-	1 Unit	BAIK
11.	Ruang Makan	-	2 Unit	BAIK
12.	Sarana rekreasi	1 Unit	-	-

- d. **Teknologi informasi (TI)**, BPSDM Provinsi Lampung belum sepenuhnya mengembangkan aplikasi kediklatan berbasis TI, selain SDM yang kurang, jaringan TI yang dimiliki belum dibangun secara memadai.

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung (BPSDMD) Provinsi Lampung

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke--				Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Pagu	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	8.573.075.500	8.529.334.750	8.899.822.000	8.399.822.000	10.847.091.176	7.791.186.146	8.482.771.206	8.174.853.923	8.070.866.146	90,88%	99,45%	89,09%	97,65%	6,84%	1,32%
Belanja Langsung	14.068.526.100	11.672.974.500	9.000.000.000	7.904.377.317	26.072.128.000	13.226.621.561	11.172.397.599	8.018.289.647	7.733.150.675	94,02%	95,71%	89,09%	97,83%	44,44%	-15,77%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.873.965.600	1.675.311.930	2.210.167.600	1.802.143.397	2.192.444.591	1.789.734.372	1.539.720.180	2.012.919.623	1.726.273.444	95,51%	91,91%	91,08%	95,79%		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.955.000	4.056.650				5.955.000	4.017.000			100,00%	99,02%	0,00	0,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	523.800.000	523.800.000	588.600.000	583.800.000	745590016	453.996.072	434.054.330	563.959.726	515.761.896	86,67%	82,87%	95,81%	88,35%		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.696.000					50.696.000				100,00%	0,00	0,00	0,00		
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	69.000.000	323.696.000	568.536.000	430.520.000	509379892	69.000.000	323.696.000	554.886.000	425.645.000	100,00%	100,00%	97,60%	98,87%		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	336.200.000	135.600.000	186.450.000	186.450.000	186450000	327.724.000	135.504.000	186.300.000	186.300.000	97,48%	99,93%	99,92%	99,92%		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.778.000	26.483.250	53.336.700	21.025.200	26566802	35.778.000	26.483.250	38.336.700	21.025.200	100,00%	100,00%	71,88%	100,00%		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.975.000	37.799.350	43.686.500	22.398.800	34316500	49.975.000	37.799.350	29.142.050	22.391.300	100,00%	100,00%	66,71%	99,97%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	92.159.200	48.883.080	86.150.900	46.972.500	60744440	88.251.600	48.874.900	51.499.100	46.222.500	95,76%	99,98%	59,78%	98,40%		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.859.000	44.447.200	57.604.800	31.132.400	53500000	47.353.000	44.276.050	39.541.700	31.128.550	98,94%	99,61%	68,64%	99,99%		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.366.000	31.140.700	36.698.200	28.133.897	33888816	45.366.000	31.140.700	23.196.100	28.132.500	100,00%	100,00%	63,21%	100,00%		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.960.000	19.080.000	19.080.000	19.080.000	19080000	21.960.000	19.080.000	18.762.000	19.080.000	100,00%	100,00%	98,33%	100,00%		
Penyediaan Makanan dan Minuman	48.500.000	28.900.000	76.852.000	49.344.000	59580000	48.439.000	28.725.000	52.646.000	48.888.000	99,87%	99,39%	68,50%	99,08%		
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	234.566.400	197.472.800	220.460.000	205.361.600	205140000	234.558.700	196.930.200	220.439.747	205.208.498	100,00%	99,73%	99,99%	99,93%		

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke--				Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Pagu	Realisasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	51.951.000	70.951.000	93.909.000	93.909.000	93920000	51.778.000	70.760.000	93.865.000	93.858.000	99,67%	99,73%	99,95%	99,95%		
Pameran dan Promosi Pembangunan	150.000.000	44.622.500	116.871.500		142896125	148.704.000	0	84.301.500		99,14%	0,00%	72,13%	0,00		
Penyediaan Jasa Tim Penilai Jabatan Fungsional Provinsi Lampung	19.100.000	48.271.700				19.100.000	48.271.700			100,00%	100,00%	0,00	0,00		
Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD	72.000.000	72.000.000				72.000.000	72.000.000			100,00%	100,00%	0,00	0,00		
Penyediaan Bahan Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan	19.100.000	18.107.700	61.932.000	84.016.000	21392000	19.100.000	18.107.700	56.044.000	82.632.000	100,00%	100,00%	90,49%	98,35%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	2.567.329.800	1.025.021.020	1.191.997.000	477.454.100	837.810.000	2.541.320.860	1.017.881.430	673.144.440	474.321.156	98,99%	99,30%	56,47%	99,34%		
Pembangunan Gedung kantor	1.059.793.800	292.000.000	18.750.000			1.050.680.000	290.440.000	18.650.000		99,14%	99,47%	99,47%	0,00		
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	462.110.000	219.690.000				457.873.000	218.573.750			99,08%	99,49%	0,00	0,00		
Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor			534.003.000	70.750.000	252140000			326.960.000	70.698.000	0,00	0,00	61,23%	99,93%		
Pengadaan Meubeleur	603.838.000	14.950.000	227.995.000	104.800.000	210000000	598.938.000	14.300.000	19.595.000	104.800.000	99,19%	95,65%	8,59%	100,00%		
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	248.369.000	162.000.000	153.200.000	110.661.600	140052000	242.498.000	161.946.250	100.160.000	110.631.600	97,64%	99,97%	65,38%	99,97%		
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	105.019.000	113.169.000	123.219.000	123.219.000	144918000	103.391.860	111.520.910	115.094.440	120.836.556	98,45%	98,54%	93,41%	98,07%		
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	70.900.000	75.000.000	99.200.000	68.023.500	90700000	70.640.000	75.000.000	73.255.000	67.355.000	99,63%	100,00%	73,85%	99,02%		
Pemeliharaan Rutin/ berkala Mebeleur	17.300.000	30.630.520	35.630.000			17.300.000	28.950.520	19.430.000		100,00%	94,52%	54,53%	0,00		
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		117.581.500					117.150.000			0,00	99,63%	0,00	0,00		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8.050.121.000	8.039.027.000	4.525.389.000	5.112.347.000	22.567.149.967	7.521.946.234	7.794.040.900	4.429.301.484	5.081.449.905	93,44%	96,95%	97,88%	99,40%		

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke--				Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Pagu	Realisasi
Pendidikan Pelatihan Formal	232.348.000	140.000.000	298.277.000	175.867.100	292079000	229.292.984	139.820.000	298.247.259	175.821.931	98,69%	99,87%	99,99%	99,97%		
Diklat Pengelolaan APBD	184.034.000					180.882.800				98,29%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Pengelolaan Barang/Aset Daerah	92.017.000					90.090.200				97,91%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Manajemen Keprotokolan	100.000.000					90.036.050				90,04%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota	201.384.000					162.893.750				80,89%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Bendahara Untuk Pelaporan Keuangan Daerah Berbasis Akrua	301.103.000					297.844.500				98,92%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan I/II CPNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	343.397.000	773.310.000				215.765.250	725.852.200			62,83%	93,86%	0,00	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan III CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	207.597.000	1.624.685.000				188.072.000	1.549.514.000			90,59%	95,37%	0,00	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan III CPNS Reguler Angkatan II dan III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung *	415.194.000					362.818.000				87,39%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan III CPNS Reguler Angkatan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung *	207.597.000					185.296.000				89,26%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan III CPNS Reguler Angkatan V Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung *	159.248.500					143.748.500				90,27%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III K1	312.814.000					303.386.000				96,99%	0,00	0,00	0,00		

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke--				Rata- rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Pagu	Realisasi
dan K2 Angk. III, IV, V dan VI CPNS Eks-Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung *															
Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III K1 dan K2 Angk. VII, VIII, IX dan X CPNS Eks-Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung *	312.814.000					304.186.000				97,24%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III K1 dan K2 Angk. XI, XII, XIII dan XIV CPNS Eks-Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung *	312.814.000					303.986.000				97,18%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III K1 dan K2 Angk. XV, XVI, XVII dan XVIII CPNS Eks-Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung *	312.814.000					303.986.000				97,18%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III K1 dan K2 Angk. XIX, XX, XXI dan XXII CPNS Eks-Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung *	312.814.000					303.986.000				97,18%	0,00	0,00	0,00		
Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III K1 dan K2 Angk. XXIII, XXIV, XXV dan XXVI CPNS Eks-Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung *	312.814.000					303.986.000				97,18%	0,00	0,00	0,00		

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke--				Rata- rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Pagu	Realisasi
Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III K1 dan K2 Angk. XXVII CPNS Eks-Honoror di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung *	80.898.500					73.548.500				90,91%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Angkatan XLV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	774.375.000					746.581.000				96,41%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Angkatan II dan III di Lingkungan Pemerintah Kab./Kota se-Provinsi Lampung *	1.770.000.000					1.657.168.700				93,63%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan SKPD	227.024.000					218.682.000				96,33%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan III CPNS Reguler Angkatan VI dan VII di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota se Provinsi Lampung	332.700.000					325.422.000				97,81%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III K1 dan K2 Angkatan XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII dan XXXIV CPNS Eks Honoror di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota se Provinsi Lampung	544.320.000					530.288.000				97,42%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Teknis Bagi ASN Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Lampung		290.970.715					290.970.715			0,00	100,00%	0,00	0,00		

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke--				Rata- rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Pagu	Realisasi
Diklat Fungsional Bagi ASN Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Lampung		427.229.285					427.162.085			0,00	99,98%	0,00	0,00		
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung		730.000.000	607.056.000	768.260.000	783976000		693.513.000	597.910.960	765.337.000	0,00	95,00%	98,49%	99,62%		
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Lingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Lampung		719.010.000		801.420.000	1567952000		676.894.000		798.487.000	0,00	94,14%	0,00	99,63%		
Diklat Kepemimpinan Tingkat III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung		628.392.000	667.266.000	803.460.000			620.118.000	651.610.962	781.743.074	0,00	98,68%	97,65%	97,30%		
Diklat Kepemimpinan Tingkat III di Lingkungan Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Lampung		1.662.900.000	1.606.050.000	849.750.000	1717464000		1.643.274.900	1.560.467.736	846.471.000	0,00	98,82%	97,16%	99,61%		
Diklat Prajabatan Golongan I/II dan III CASN Eks Honorar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten /Kota se Provinsi Lampung		1.042.530.000		776.796.400			1.026.922.000		776.796.400	0,00	98,50%	0,00	100,00%		
Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar Dan Pilihan			98.686.000		168056000			98.356.400		0,00	0,00	99,67%	0,00		
Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Non-Pelayanan Dasar			98.686.000		77103000			98.259.000		0,00	0,00	99,57%	0,00		
Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Penunjang			197.372.000	776.796.400	173944000			185.762.200	776.796.400	0,00	0,00	94,12%	100,00%		

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke--				Rata- rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Pagu	Realisasi
Pengembangan Kompetensi Umum			202.300.000	79.999.200	436620000			202.299.856	79.999.200	0,00	0,00	100,00%	100,00%		
Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi			101.096.000	79.997.900	301580000			100.932.711	79.997.900	0,00	0,00	99,84%	100,00%		
Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional			648.600.000		759559967			635.454.400		0,00	0,00	97,97%	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan III CASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Lampung					16288816000					0,00	0,00	0,00	0,00		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	179.587.000	114.265.550	106.287.400	105.428.000	50.245.263	174.234.000	112.815.550	105.582.000	105.380.000	97,02%	98,73%	99,34%	99,95%		
Penyusunan Pelaporan Keuangan	65.387.000	42.391.550	61.482.400	53.560.000	8880113	65.089.000	42.061.550	61.133.000	53.560.000	99,54%	99,22%	99,43%	100,00%		
Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	85.000.000	18.980.000	44.805.000	51.868.000	7093150	81.558.000	18.980.000	44.449.000	51.820.000	95,95%	100,00%	99,21%	99,91%		
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Per-Semester	29.200.000	52.894.000				27.587.000	51.774.000			94,48%	97,88%	0,00	0,00		
Penyusunan Renstra					34272000					0,00	0,00	0,00	0,00		
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	615.894.200	427.050.000	748.474.600	203.237.420	251.317.409	479.236.050	349.373.640	585.469.500	142.414.182	77,81%	81,81%	78,22%	70,07%		
Lembaga Sertifikasi Profesi	132.607.200	259.450.500	304.096.000	69.384.900	114890760	123.870.200	218.227.340	224.330.100	68.449.462	93,41%	84,11%	73,77%	98,65%		
Komite Penjamin Mutu Diklat	66.724.000	40.750.000	44.760.000	24.343.520	49849886	64.555.550	26.274.000	18.538.000	24.139.520	96,75%	64,48%	41,42%	99,16%		
Analisa Kebutuhan Diklat	127.230.000	57.099.500				99.357.000	50.574.300			78,09%	88,57%	0,00	0,00		
Peningkatan Kemampuan Penelitian Widyaiswara	54.333.000	35.000.000	101.960.600		35592777	29.483.000	27.794.000	45.476.400		54,26%	79,41%	44,60%	0,00		
Penerbitan Majalah/Buletin Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung	85.000.000	34.750.000	61.470.000	29.509.000	50983986	74.632.650	26.504.000	61.065.000	28.759.000	87,80%	76,27%	99,34%	97,46%		

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke--				Rata- rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Pagu	Realisasi
Akreditasi	150.000.000			80.000.000		87.337.650			21.066.200	58,23%	0,00	0,00	26,33%		
Pembinaan Kediklatan, Pengelolaan Kelembagaan Dan Pengembangan Kompetensi Aparatur			236.188.000					236.060.000		0,00	0,00	99,95%	0,00		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	294.790.500	176.219.000	217.684.400	203.767.400	173.160.770	262.880.400	167.777.200	211.872.600	203.311.988	89,18%	95,21%	97,33%	99,78%		
Penyusunan dan Penetapan Program dan Kegiatan Bandiklatda Provinsi Lampung	243.650.100	136.713.000	192.793.400	178.499.400	149304645	211.740.000	135.259.200	187.429.600	178.115.988	86,90%	98,94%	97,22%	99,79%		
Pevelenggaraan Musrenbang SKPD	51.140.400	39.506.000	24.891.000	25.268.000	23856125	51.140.400	32.518.000	24.443.000	25.196.000	100,00%	82,31%	98,20%	99,72%		
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	10.000.000	10.000.000				10.000.000	10.000.000			100,00%	100,00%	0,00	0,00		
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar	10.000.000	10.000.000				10.000.000	10.000.000			100,00%	100,00%	0,00	0,00		
Program Pendidikan Kedinasan	267.394.000	102.480.000				260.926.145	83.433.699			97,58%	81,41%	0,00	0,00		
Peningkatan Keterampilan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Widyaiswara	267.394.000	102.480.000				260.926.145	83.433.699			97,58%	81,41%	0,00	0,00		
Program Monitoring dan Diklat Aparatur	150.827.000	79.000.000				130.546.000	72.785.000			86,55%	92,13%	0,00	0,00		
Monitoring dan Pembinaan Kediklatan	150.827.000	79.000.000				130.546.000	72.785.000			86,55%	92,13%	0,00	0,00		
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	58.617.000	24.600.000				55.797.500	24.570.000			95,19%	99,88%	0,00	0,00		
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	58.617.000	24.600.000				55.797.500	24.570.000			95,19%	99,88%	0,00	0,00		

**Tabel 2.13 Evaluasi Hasil Terhadap Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Periode Pelaksanaan Januari s.d Desember 2020**

No	KODE PEREMEN DAGRI	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2019		Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Tahun 2020		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6+8		11=10/5	
1	04.04.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	500,00	4.358.097.262	0,00	0,00	100,00	787.512.600,00	100,00	734.554.911,00	100,00	93,28	100,00	734.554.911,00	20,00	16,85
2	04.04.01.002	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Layanan administrasi keuangan	500,00	4.002.382.220	0,00	0,00	100,00	418.758.800,00	100,00	371.698.800,00	100,00	88,76	100,00	371.698.800,00	20,00	9,29
3	04.04.01.003	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Layanan Kebersihan Kantor	500,00	1.231.448.064	0,00	0,00	100,00	186.450.000,00	100,00	186.300.000,00	100,00	99,92	100,00	186.300.000,00	20,00	15,13
4	04.04.01.005	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan ATK	13.276,00	198.666.081	0,00	0,00	1.954	30.560.500,00	1.954,00	30.536.400,00	100,00	99,92	1.954,00	30.536.400,00	14,72	15,37
5	04.04.01.006	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	531.744,00	263.383.875	0,00	0,00	78.866	35.001.700,00	78.866,00	34.810.700,00	100,00	99,45	78.866,00	34.810.700,00	14,83	13,22
6	04.04.01.007	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.938,00	424.748.860	0,00	0,00	2.123,00	64.310.000,00	2.123,00	63.852.200,00	100,00	99,29	2.123,00	63.852.200,00	15,23	15,03
7	04.04.01.008	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	11.685,00	982.710.270	0,00	0,00	1.733,00	144.360.300,00	1.733,00	142.048.300,00	100,00	98,40	1.733,00	142.048.300,00	14,83	14,45
8	04.04.01.009	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	27.875,00	417.282.563	0,00	0,00	165,00	60.000.000,00	165,00	56.824.000,00	100,00	94,71	165,00	56.824.000,00	0,59	13,62
9	04.04.01.010	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Layanan Makan dan Minum	393,00	460.876.621	0,00	0,00	58,00	69.780.000,00	23,00	26.940.000,00	39,66	38,61	23,00	26.940.000,00	5,85	5,85
10	04.04.01.011	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	556,00	4.261.099.090	0,00	0,00	50,00	1.189.996.000,00	23,00	543.103.876,00	46,00	45,64	23,00	543.103.876,00	4,14	12,75
11	04.04.01.013	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Tenaga PTHL	75,00	2.318.252.992,00	0,00	0,00	12,00	282.011.400,00	12,00	280.000.000,00	100,00	99,29	12,00	280.000.000,00	16,00	12,08
12	04.04.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	228,00	1.276.155.002,00	0,00	0,00	32,00	1.109.389.500,00	30,00	957.453.000,00	93,75	86,30	30,00	957.453.000,00	13,16	75,03

No	KODE PEREMEN DAGRI	PROGRAM/KEGIA TAN	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2019		Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Tahun 2020		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6+8		11=10/5	
13	04.04.02.004	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	30,00	987.355.701,00	0,00	0,00	6,00	149.631.000,00	6,00	145.541.239,00	100,00	97,27	6,00	145.541.239,00	20,00	14,74
14	04.04.02.005	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.540,00	821.295.612,00	0,00	0,00	252,00	124.350.000,00	252,00	122.350.000,00	100,00	98,39	252,00	122.350.000,00	16,36	14,90
15	04.04.03.001	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	538,00	3.467.472.423,00	0,00	0,00	34,00	191.235.000,00	34,00	185.499.170,00	100,00	97,00	34,00	185.499.170,00	6,32	5,35
16	04.04.03.002	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Anjab, ABK, Evaluasi Jabatan dan lain-lain	134,00	303.043.881,00	0,00	0,00	9,00	45.213.000,00	9,00	44.204.000,00	100,00	97,77	9,00	44.204.000,00	6,72	14,59
17	04.04.04.001	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	100,00	239.513.181,00	0,00	0,00	20,00	10.000.000,00	20,00	9.993.800,00	100,00	99,94	20,00	9.993.800,00	20,00	4,17
18	04.04.04.002	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian keuangan SKPD	60,00	363.259.016,00	0,00	0,00	12,00	28.320.000,00	12,00	27.934.000,00	100,00	98,64	12,00	27.934.000,00	20,00	7,69
19	04.04.04.003	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	90,00	1.565.941.875,00	0,00	0,00	18,00	155.295.200,00	18,00	149.814.000,00	100,00	96,47	18,00	149.814.000,00	20,00	9,57
20	04.04.04.005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	307,00	138.564.497,00	0,00	0,00	50,00	36.571.800,00	50,00	36.389.800,00	100,00	99,50	50,00	36.389.800,00	16,29	26,26
21	04.04.16.006	Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	590,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00	70,00	264.942.000,00	70,00	240.150.100,00	100,00	90,64	70,00	240.150.100,00	11,86	8,89
22	04.04.16.007	Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	290,00	1.595.144.691,00	0,00	0,00	58,00	210.889.000,00	58,00	193.998.100,00	100,00	91,99	58,00	193.998.100,00	20,00	12,16
23	04.04.17.002	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Non Pelayanan Dasar	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	600,00	3.038.876.515,00	0,00	0,00	90,00	241.592.000,00	86,00	201.411.958,00	95,56	83,37	86,00	201.411.958,00	14,33	6,63

No	KODE PEREMEN DAGRI	PROGRAM/KEGIA TAN	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2019		Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Tahun 2020		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6+8		11=10/5	
24	04.04.17.003	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Penunjang	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	600,00	3.039.130.448,00	0,00	0,00	90,00	241.592.000,00	89,00	198.888.717,00	98,89	82,32	89,00	198.888.717,00	14,83	6,54
25	04.04.18.002	Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	600,00	3.877.305.266,00	0,00	0,00	60,00	288.436.400,00	60,00	281.483.200,00	100,00	97,59	60,00	281.483.200,00	10,00	7,26
26	04.04.02.002	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.368,00	6.346.728.168,00	0,00	0,00	263,00	2.475.822.306,00	259,00	2.213.875.300,00	98,48	89,42	259,00	2.213.875.300,00	18,93	34,88
27	04.04.04.004	Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	Implementasi aplikasi e-Government dan pameran	10,00	1.917.342.172,00	0,00	0,00	2,00	240.000.000,00	2,00	190.000.000,00	100,00	79,17	2,00	190.000.000,00	20,00	9,91
28	04.04.16.008	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2.365,00	31.497.075.000	0,00	0,00	1.382,00	12.647.251.900,00	643,00	4.769.723.500,00	46,53	37,71	643,00	4.769.723.500	27,19	15,14
29	04.04.17.001	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar dan Pilihan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	600,00	3.036.257.806,00	0,00	0,00	90,00	229.320.000,00	87,00	167.789.000,00	96,67	73,17	87,00	167.789.000,00	14,50	5,53
30	04.04.18.001	Pengembangan Kompetensi Umum	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	570,00	4.434.844.000,00	0,00	0,00	60,00	315.216.594,00	60,00	241.411.034,00	100,00	76,59	60,00	241.411.034,00	10,53	5,44
31	04.04.18.003	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1.530,00	6.166.932.840,00	0,00	0,00	360,00	1.253.083.400,00	360,00	1.229.530.027,00	100,00	98,12	360,00	1.229.530.027	23,53	19,94
32	04.04.21.001	Uji Kompetensi dan peningkatan kapasitas asesor	Jumlah peserta uji kompetensi dan peningkatan asesor	500,00	1.679.422.144,00	0,00	0,00	100,00	259.812.800,00	100,00	236.611.600,00	100,00	91,07	100,00	236.611.600,00	20,00	14,09

No	KODE PEREMEN DAGRI	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2019		Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Tahun 2020		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6+8		11=10/5	
33	04.04.21.002	Pengelolaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas Widyaiswara	Jumlah KPMD, akreditasi dan karya ilmiah WI	93,00	1.019.265.863,00	0,00	0,00	3,00	53.581.700,00	3,00	43.400.200,00	100,00	81,00	3,00	43.400.200,00	3,23	4,26
34	04.04.21.003	Kerjasama dan penyediaan sumber belajar	Jumlah dokumen kerjasama, buletin dan pembelajaran	2.140,00	656.153.971,00	0,00	0,00	200,00	32.121.000,00	200,00	32.051.500,00	100,00	99,78	200,00	32.051.500,00	9,35	4,88
Rata-Rata capaian kinerja %												94,57	88,25			14,80	13,87
Predikat kinerja												sangat tinggi	tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah
Monitoring Faktor																	
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja				Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan serta juklak dan juknis sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas													
Faktor penghambat pencapaian kinerja				Terbatasnya anggaran yang diberikan/disediakan oleh Bakeuda pada triwulan sebelumnya menyebabkan kegiatan banyak dilakukan di triwulan akhir, sehingga pada pelaksanaan beberapa kegiatan kekurangan SDM													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				1. Mengoptimalkan kinerja SDM 2. Mengoptimalkan evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing bidang terkait													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya				1. Mengoptimalkan sinkronisasi antara jadwal rencana kegiatan dengan ketersediaan anggaran per triwulan 2. Mengefektifkan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan													

Kebijakan anggaran BPSDM Provinsi Lampung dari tahun 2015 hingga 2018 menunjukkan penurunan, hal ini disebabkan karena kondisi kemampuan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung. Rata-rata penurunan yang dialami berkisar -12,16% untuk anggaran dan 11,64% untuk realisasi anggaran. Jika ditinjau dari rasio antara realisasi dan anggaran, pencapaian terbaik dari BPSDM Provinsi Lampung yaitu pada tahun 2016 sebesar 97,29%, sedangkan kurang baik tercapai pada tahun 2017 sebesar 90,46%. Ada beberapa faktor pendukung tercapainya rasio baik, antara lain: Terserapnya sebagian besar anggaran kegiatan sehingga kinerja anggaran sesuai dengan yang ditargetkan, Pengelolaan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran kas (RAK).

Adapun untuk renstra 2019-2024 tahun pertama (2020), serapan anggaran sebesar Rp. 14.390.172.432,- atau 60,28% dari yang dianggarkan yaitu Rp.23.872.407.900,- dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 94,57%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan kurang optimalnya pelaksanaan diklat yang bersumber dari setoran kab/kota akibat kebijakan refocusing anggaran yang dijalankan pemerintah kab/kota dimana sebagian besar anggaran diklat dialihkan untuk mendukung penanganan/mitigasi pandemi covid 19 di sektor vital seperti Kesehatan dan bansos kepada masyarakat.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

Tantangan

Tantangan yang dihadapi BPSDM Provinsi Lampung untuk meningkatkan kinerja pelayanan periode sebelumnya antara lain:

1. Peningkatan kapasitas manajemen pelayanan diklat yang unggul melalui peningkatan kualifikasi akreditasi lembaga diklat;
2. Adanya lembaga diklat provinsi lain yang berakreditasi A dan memiliki program/kegiatan diklat yang dapat diakses luas, yang diselenggarakan oleh tenaga kediklatan yang berkompeten dilengkapi sarana prasarana yang memadai sesuai standar yang berlaku.

Peluang

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul antara lain:

1. Adanya kebutuhan SDM aparatur yang berkompeten dan profesional dari Pemerintah Provinsi Lampung sebagai agen reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintah;
2. Adanya kebijakan Permendagri nomor 38 tahun 2018 yang mengatur tentang pengalokasian anggaran pengembangan kompetensi sebanyak 0,34% dari total APBD Provinsi, sehingga potensi pengembangan kompetensi SDM aparatur Provinsi Lampung semakin banyak;
3. Kementerian/instansi pembina diklat yang bersedia memberikan dukungan dan fasilitasi dalam upaya peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan diklat untuk mewujudkan SDM aparatur yang profesional seperti LAN RI, BPSDM Kemendagri, dan lembaga lainnya.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, masih terdapat persoalan yang belum maksimal tertangani oleh BPSDM Provinsi Lampung. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan SDM aparatur Provinsi Lampung yang kompeten relatif rendah

Dari **15.861** orang SDM aparatur di Provinsi Lampung, pada tahun 2020 baru **2.899** orang yang mengikuti pengembangan kompetensi atau sekitar **18,28%** di BPSDM Provinsi Lampung. Masih terdapat **12.962** orang aparatur yang belum mengikuti pengembangan kompetensi baik pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan, teknis inti maupun teknis umum dan fungsional. Hal ini disebabkan dari sisi anggaran yang kurang mendukung.

2. Belum adanya pemetaan kebutuhan diklat aparatur Provinsi Lampung

Perencanaan diklat masih berdasarkan identifikasi kebutuhan diklat, bukan pemetaan kebutuhan diklat masing-masing aparatur yang dihasilkan dari analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum adanya standar kompetensi jabatan aparatur untuk mengukur kesenjangan dan kompetensi yang dibutuhkan.

3. Belum optimalnya evaluasi penyelenggaraan diklat di BPSDM Provinsi Lampung

Evaluasi penyelenggaraan diklat lebih banyak menyorot pada pelaksanaannya saja, belum sepenuhnya sampai pada evaluasi pasca diklat. Sehingga dampak peningkatan kompetensi SDM aparatur di unit kerja tidak terukur.

4. **Sarana prasarana kediklatan yang masih terbatas**

Terbatasnya sarana prasarana kediklatan yang sesuai standar untuk mengakomodir peserta diklat dalam jumlah besar seperti asrama, ruang kelas dan peralatan belajar mengajar.

5. **Belum memadainya dan termanfaatkannya Teknologi Informatika**

BPSDM Provinsi Lampung sampai saat ini masih banyak melakukan tata kelola administrasi kediklatan secara manual, mulai dari registrasi peserta, kamar peserta dan database kediklatan lainnya. Hal ini disebabkan masih kurangnya SDM TI dan sarana yang belum memadai

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam melaksanakan pembangunan Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024, maka Visi Provinsi Lampung adalah: **“Rakyat Lampung Berjaya”**(*aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera*)

Untuk mewujudkan visi tersebut, Misi Pembangunan Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan adalah:

1. **MISI 1** : Menciptakan kehidupan yang relegius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
2. **MISI 2** : Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. **MISI 3** : Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.
4. **MISI 4** : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. **MISI 5** : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

6. MISI 6 : Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung adalah salah satu OPD Pemerintah Provinsi Lampung yang juga memiliki tugas dan kewajiban untuk bersama-sama SKPD lainnya mewujudkan misi Provinsi Lampung terutama pada Misi 2 (dua) yaitu: **“Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”**. Dengan agenda kerja yang akan diwujudkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih adalah: **Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dengan menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetensi.**

Misi ke-2 (dua) merupakan upaya untuk mendukung meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik yang dilakukan dengan: Membenahi dan meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional dalam pembangunan dan pelayanan publik. Semangat reformasi birokrasi dengan 3 (tiga) pilar utama yaitu penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis serta peningkatan disiplin dan manajemen SDM perlu dilakukan secara menyeluruh agar tercipta **birokrasi** pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Permasalahan-permasalahan pelayanan BPSDM Provinsi Lampung dan faktor-faktor yang terkait secara langsung terhadap pencapaian Visi, Misi dan agenda kerja Gubernur Lampung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Lampung Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur

VISI : Rakyat Lampung Berjaya				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan BPSDM	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Misi 2: Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.</p> <p>Agenda Kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dengan menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetensi - Pembangunan SDM Aparatur dan non aparatur sebagai <i>human capital</i> pada bidang Tata kelola pemerintahan, pariwisata, pertanian/kehutanan, pendidikan, ekonomi kerakyatan dan sebagainya 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur untuk meningkatkan pelayanan publik - Belum memadainya kualitas SDM dan sarana prasarana kediklatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya anggaran menyebabkan belum seluruhnya PNS Provinsi Lampung dapat mengikuti pengembangan kompetensi (dari 9.337 PNS, baru 1274 orang yang mengikuti pengembangan kompetensi) - Anggaran peningkatan sarana dan prasana yang terbatas - Prioritas diklat yang ditetapkan belum sepenuhnya sesuai pemetaan kebutuhan diklat aparatur - Masih banyak job description yang tidak sesuai kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya potensi PNS Provinsi Lampung yang dapat dikembangkan kompetensinya - Adanya kebijakan Permendagri nomor 38 tahun 2018 dan 33 tahun 2019, dimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah sekurang-kurangnya 0,34% dari total belanja daerah APBD Pemerintah Provinsi

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Visi Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah: ***“Sebagai institusi Pembelajar yang Mampu Menjadi Penggerak dan Mitra Strategis dalam Mewujudkan Pemerintahan Berkelas Dunia Tahun 2024”***.

Adapun sasaran jangka menengah Renstra Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI adalah:

1. Meningkatnya kualitas hasil kebijakan
2. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN

3. Meningkatnya pengembangan dan praktek inovasi di bidang administrasi negara
4. Terwujudnya pengembangan dan penerapan ilmu administrasi negara
5. Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga

Secara spesifik tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Lampung terkait langsung dengan pencapaian sasaran kedua dari Renstra Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI yaitu : **Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN.** Sedangkan sasaran jangka menengah Renstra BPSDM Kementerian Dalam Negeri adalah: **Terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.**

Dengan memperhatikan sasaran-sasaran jangka menengah renstra K/L tersebut di atas, maka Permasalahan-permasalahan pelayanan BPSDM Provinsi Lampung dan faktor-faktor yang terkait secara langsung terhadap pencapaian sasaran jangka menengah Renstra Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan Renstra BPSDM Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Lampung Terhadap Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Renstra Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan Renstra BPSDM Kementerian Dalam Negeri

No.	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan BPSDM Provinsi Lampung	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Renstra LAN RI - Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN	- Terbatasnya kemampuan anggaran pengembangan kompetensi SDM aparatur di BPSDM Provinsi Lampung	- Kemampuan Keuangan Daerah yang kurang mendukung - Prioritas diklat yang ditetapkan belum sepenuhnya sesuai pemetaan kebutuhan diklat aparatur	- Adanya kebijakan Permendagri nomor 39 tahun 2018 dan 33 tahun 2019 yang mengatur tentang pengalokasian anggaran pengembangan kompetensi sebanyak 0,34% dari total APBD Provinsi

No.	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan BPSDM Provinsi Lampung	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Renstra BPSDM Kemendagri - Terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	- Terbatasnya kualitas SDM, stakeholder kediklatan dan sarana prasarana pendukung	- SDM dan sarana prasarana yang kurang memadai	- Kementerian/ instansi pembina diklat mendorong dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan reformasi diklat aparatur

Telaahan terhadap Renstra Kabupaten/Kota yang menangani diklat belum dapat dilakukan, karena sebagian besar kabupaten/kota belum selesai menyusun renstra.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih serta Renstra K/L, maka dapat isu-isu strategis BPSDM Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. **Terciptanya sistem kerja berbasis kinerja dan kompetensi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.**

Untuk melahirkan aparatur yang profesional perlu ditingkatkan kompetensinya, kreativitas, inovasi dan sikap perilakunya melalui diklat/pengembangan kompetensi dan BPSDM Provinsi Lampung bertugas untuk mewujudkan itu.

2. **Tingkat kepatuhan terhadap Permendagri nomor 38 tahun 2018 dan 33 tahun 2019 masih rendah.**

Ketentuan pengalokasian anggaran pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sebanyak 0,34% dari total APBD Provinsi belum terpenuhi, dari ketentuan tersebut baru 0,07% yang teranggarkan dalam APBD BPSDM Provinsi Lampung TA 2019.

3. **Agenda kerja/Janji kerja Gubernur/Wagub terkait Pembangunan SDM Aparatur dan non aparatur sebagai *human capital* dalam pelaksanaan roda pembangunan diantaranya pada bidang Tata kelola pemerintahan,**

pariwisata, pertanian/kehutanan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, pemerintahan desa.

Untuk mendukung *common goal* pemerintah Provinsi Lampung di atas, jenis-jenis diklat yang akan diselenggarakan BPSDM seyogyanya dapat mengakomodir bidang urusan tersebut dengan tetap memperhatikan prioritas kebutuhan.

4. Peningkatan Daya Saing BPSDM Provinsi Lampung

Sebagai upaya BPSDM menjadi unggul dengan fokus kepada penguatan kelembagaan, perbaikan sistem penyelenggaraan dan prosedur serta kualitas tenaga penyelenggara/ widyaiswara.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

Dalam rangka mewujudkan dan menjalankan Visi dan Misi Gubernur Terpilih Provinsi Lampung periode 2019-2024, terutama pencapaian Misi Kedua yaitu “Mewujudkan *“good governance”* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik, ditetapkan tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut:

Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Indikator tujuan : Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)

Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi

Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)

Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja

Indikator Sasaran : Opini BPK / WTP

Indikator Sasaran : Nilai SAKIP

Sasaran 3.1.3 : Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

Indikator Sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Secara spesifik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab terkait pencapaian tujuan 3 dan sasaran 3.1.1 pada Misi 2 tersebut di atas. Untuk memenuhi aspek keselarasan antara RPJMD dan Renstra, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung menetapkan sasaran 3.1.1 dan indikator sasaran sebagai rujukan penetapan tujuan dan indikator tujuan organisasi.

Dalam perencanaan strategis perumusan tujuan dan sasaran merupakan satu kesatuan dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah

Provinsi Lampung. Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung menetapkan tujuan yaitu:

1. Terwujudnya Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur yang Efektif

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh BPSDM yang ditetapkan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu lima tahun yang dialokasikan secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Mengacu pada tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung serta Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Lampung, BPSDM menetapkan 2 (dua) sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengembangan kompetensi SDM aparatur
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat

Pandemi covid 19 yang terjadi pada awal tahun 2020 secara langsung berpengaruh terhadap capaian target indikator sasaran /IKU BPSDM Provinsi Lampung, hal ini disebabkan pemerintah pusat dan daerah harus mengambil langkah cepat untuk penanganan wabah covid 19 salah satunya melalui *refocussing* anggaran yang dititikberatkan untuk memperkuat belanja sektor Kesehatan (biaya vaksin, pengobatan covid dan jasa tenaga medis). Hal tersebut tentunya berdampak pada berkurangnya anggaran setiap perangkat daerah dan mempengaruhi capaian kinerja PD. Berdasarkan hal tersebut, BPSDM Provinsi Lampung melakukan penyesuaian terhadap target indikator awal Renstra BPSDM 2019-2024 khususnya untuk indikator sasaran . Perhitungan ulang target sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.8 di Bab II. Gambaran Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.

Secara rinci tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan tabel 4.1 berikut ini:

Gambar 4.1

Hubungan Visi, Misi Kepala Daerah 2019-2024 dan Tujuan, Sasaran BPSDM
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Visi Provinsi Lampung 2019-2024: “Rakyat Lampung Berjaya”
Misi ke 2 Provinsi Lampung 2019-2024: “Mewujudkan <i>"Good Governance"</i> Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik”
Tujuan ke 3 RPJMD 2019-2024: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Sasaran 3.1.1 RPJMD 2019-2024: Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
Tujuan BPSDM 2019-2024: Terwujudnya Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur yang efektif
Sasaran BPSDM 2019-2024: 1. Meningkatnya kompetensi SDM aparatur 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat

Tabel. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung 2019-2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	Kondisi Awal (tahun 2018)	TARGET KINERJA									
						2019	2020	2021	Rencana Revisi Target	2022	Rencana Revisi Target	2023	Rencana Revisi Target	2024	Rencana Revisi Target
Terwujudnya Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur yang Efektif	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	Meningkatnya pengembangan kompetensi SDM aparatur	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	Jumlah SDM aparatur yang memiliki sertifikat diklat dengan predikat memuaskan atau hasil post test minimal 70 s.d tahun berjalan dibagi Jumlah PNS Pemprov Lampung dikali 100%	7,65%	12,54%	20,28%	29,34%	25,34%	39,09%	32,39%	48,84%	38,30%	59,07%	48,40%
	Nilai Akreditasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat	Nilai Akreditasi	Berdasarkan hasil Kualifikasi Nilai Akreditasi	B	B	B	B		A		A		A	

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi merupakan bagian terpenting dalam proses perencanaan stratejik karena strategi memuat rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Adapun Kebijakan adalah upaya mencapai tujuan, sasaran, dan strategi, yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program.

Secara garis besar tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BPSDM Provinsi Lampung selama 5 tahun (2020 – 2024) dapat dilihat pada Tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : “Rakyat Lampung Berjaya” (aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera)			
Misi: “Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur yang Efektif	1. Sasaran 1.1 Meningkatnya pengembangan kompetensi SDM aparatur	1. Strategi 1.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Arah Kebijakan 1.1 Pengembangan Kompetensi Manajerial bagi pejabat eselon, CPNS, Pimpinan Daerah dan Pimpinan Tinggi 2. Arah Kebijakan 1.2 Pengembangan Kompetensi inti jabatan administrasi pelayanan dasar dan pilihan, pelayanan non dasar dan urusan penunjang 3. Arah Kebijakan 1.3 Pengembangan Kompetensi Umum, Pilihan jabatan administrasi dan jabatan fungsional 4. Arah Kebijakan 1.4 Melaksanakan diklat Toc, MoT dan ToF bagi tenaga penyelenggara dan tenaga manajemen pengembangan kompetensi serta widyaiswara BPSDM Provinsi Lampung
	2. Sasaran 1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat	1. Strategi 2.1 Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Kelembagaan	1. Arah Kebijakan 2.1 Uji kompetensi dan peningkatan kapasitas asesor 2. Arah Kebijakan 2.3 Arah Kebijakan 2.4 Meningkatkan sarana dan prasarana kediklatan sesuai standar yang berlaku

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata sistematis dan terpadu yang merupakan penjabaran lebih rinci tentang langkah-langkah yang diambil oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan dalam mencapai tujuan, dan sasaran organisasi. Sedangkan **Kegiatan** merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung yang termuat dalam Renstra periode tahun 2019 – 2024 bersumber dari APBD murni Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari setoran diklat pemerintah kabupaten/kota. Alokasi penganggaran program dan kegiatan khususnya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama organisasi berpedoman kepada peraturan yang berlaku. Untuk periode 2020 – 2024, target (PAD) dari setoran diklat pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. Target PAD Setoran Diklat Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

Uraian	Target PAD (Rp.)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Setoran Diklat Kab/Kota	10.893.008.000	10.893.008.000	11.572.688.000	6.273.200.000	5.747.200.000
Target Peserta	1382 Orang	1382 Orang	1473 Orang	1120 Orang	1020 Orang

Sumber: BKPSDM dan BKDD Kab/Kota tahun 2021

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BPSDM Provinsi Lampung 2019 – 2024 disajikan dalam lampiran Tabel C.27.

**Tabel C.27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) (SESUAI KEPMENDAGRI 050_5889 TH 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2020		2021		2022			2023		2024		TARGET	RP.			TARGET	RP.
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.
1	2	3	4	5	6	7						8				9	10					
1 Terwujudnya pengelolaan pengembangan kompetensi aparatur yang efektif	1 Meningkatnya pengembangan kompetensi SDM aparatur	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	I PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM yang ditingkatkan	-			100%	16.630.100.700	100%	13.125.568.900	Persentase pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM yang ditingkatkan	100%	14.079.900.000	100%	15.494.360.000	100%	59.329.929.600	BPSDM	Hajimena		
			1 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Peserta yang lulus Pengembangan Kompetensi teknis dengan hasil post tes di atas 70	-			100%	1.495.321.100	100%	1.316.305.100	Persentase Peserta yang lulus Pengembangan Kompetensi teknis dengan hasil post tes di atas 70	100%	2.166.000.000	100%	3.171.000.000	100%	8.148.626.200	BPSDM	Hajimena		
			- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-			450 Orang	1.495.321.100	450 Orang	1.316.305.100	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	780 Orang	2.166.000.000	1063 Orang	3.171.000.000	2580 Orang	8.148.626.200	BPSDM	Hajimena		
			II Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Manajerial	Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi Manajerial dengan predikat memuaskan	85.26%	100%	5.419.336.000										100%	5.419.336.000	BPSDM	Hajimena		
			1 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	365 Orang	280 Orang	4.659.120.000										280 Orang	4.659.120.000	BPSDM	Hajimena		
			2 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-	110 Orang	500.000.000										110 Orang	500.000.000	BPSDM	Hajimena		
			3 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-	58 Orang	260.216.000										58 Orang	260.216.000	BPSDM	Hajimena		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) (SESUAI KEPENDAGRI 050_5889 TH 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2020		2021		2022			2023		2024		TARGET	RP.			TARGET	RP.
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.
1	2	3	4	5	6	7						8		9	10							
			III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Inti	Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi Teknis Inti dengan hasil post test minimal 70	85.26%	100%	1.380.000.000									100%	1.380.000.000	BPSDM	Hajimena			
			1 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar dan Bimbingan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	30 Orang	120 Orang	460.000.000									120 Orang	460.000.000	BPSDM	Hajimena			
			2 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Non Pelayanan Dasar	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	30 Orang	120 Orang	460.000.000									120 Orang	460.000.000	BPSDM	Hajimena			
			3 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Penunjang	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang	120 Orang	460.000.000									120 Orang	460.000.000	BPSDM	Hajimena			
			IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Umum dan Fungsional	Persentase aparatur dan non aparatur yang lulus pengembangan kompetensi Teknis Umum dan Fungsional dengan hasil post test minimal 70	85.26%	100%	2.220.000.000									100%	2.220.000.000	BPSDM	Hajimena			
			1 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Umum	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	330 Orang	90 Orang	500.000.000									90 Orang	500.000.000	BPSDM	Hajimena			
			2 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	270 Orang	120 Orang	700.000.000									120 Orang	700.000.000	BPSDM	Hajimena			
			3 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	214 Orang	270 Orang	1.020.000.000									270 Orang	1.020.000.000	BPSDM	Hajimena			
	2 Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat	Nilai Akreditasi	1 Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pemenuhan penyelenggaraan sertifikasi, dan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang sesuai standar	-			100%	15.134.779.600	100%	11.809.263.800	Persentase pemenuhan penyelenggaraan sertifikasi, dan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang sesuai standar	100%	11.913.900.000	100%	12.323.360.000	100%	51.181.303.400	BPSDM	Hajimena		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) (SESUAI KEPMENDAGRI 050_5889 TH 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2020		2021		2022			2023		2024		TARGET	RP.			TARGET	RP.
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.
1	2	3	4	5	6	7						8				9	10					
			- Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen LSP	-			1 dokumen	43.747.900	1 dokumen	43.747.900	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Lembaga	50.000.000	1 Lembaga	50.000.000	2 Lembaga	187.495.800	BPSDM	Hajimena		
			- Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta uji kompetensi dan peningkatan asesor	-			100 orang	183.443.100	100 orang	183.443.100	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	400 orang	685.000.000	450 orang	815.000.000	1050 orang	1.866.886.200	BPSDM	Hajimena		
			- Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan sumber belajar	-			3 dokumen	188.073.600	3 dokumen	309.173.600	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	4 Laporan	200.000.000	5 Laporan	200.000.000	9 Laporan	897.247.200	BPSDM	Hajimena		
			- Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Kerjasama	-			2 Dokumen	15.300.000	2 Dokumen	15.300.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	3 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	25.000.000	11 Dokumen	75.600.000	BPSDM	Hajimena		
			- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-			1692 Orang	14.588.695.000	1692 Orang	11.142.079.200	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1449 Orang	10.843.380.000	1530 Orang	11.117.840.000	6263 Orang	47.691.994.200	BPSDM	Hajimena		
			- Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan	Jumlah pelaksanaan KPMD, akreditasi dan karya ilmiah WI	-			6 kali	115.520.000	6 kali	115.520.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Dokumen	115.520.000	6 Dokumen	115.520.000	12 Dokumen	462.080.000	BPSDM	Hajimena		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) (SESUAI KEPENDAGRI 050_5889 TH 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2020		2021		2022			2023		2024		TARGET	RP.			TARGET	RP.
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.
1	2	3	4	5	6	7						8				9	10					
			II Program Pembinaan, pengembangan dan Pengelolaan Kelembagaan	Persentase pemenuhan penyelenggaraan diklat sesuai standar	80%	100%	507.960.000										100%	507.960.000	BPSDM	Hajimena		
			1 Kegiatan Uji Kompetensi dan peningkatan kapasitas asesor	Jumlah peserta uji kompetensi dan peningkatan asesor	-	100 orang	278.244.800										100 orang	278.244.800	BPSDM	Hajimena		
			2 Kegiatan Pengelolaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas WI	Jumlah pelaksanaan KPMD, akreditasi dan karya ilmiah WI	15 Kali	13 Kali	144.931.200										13 Kali	144.931.200	BPSDM	Hajimena		
			3 Kegiatan Kerjasama dan penyediaan sumber belajar	Jumlah dokumen kerjasama, buletin dan pembelajaran	1433 Buah	320 Buah	84.784.000										320 Buah	84.784.000	BPSDM	Hajimena		
			I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100%	18.872.507.200	100%	19.653.706.092	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	19.014.483.207	100%	22.548.380.740	100%	80.089.077.239	BPSDM	Hajimena		
			1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100%	251.188.000	100%	145.224.500	Persentase kesesuaian dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	155.780.000	100%	162.011.200	100%	714.203.700	BPSDM	Hajimena		
			- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	-			18 Dokumen	198.576.000	18 Dokumen	92.612.500	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	100.000.000	18 Dokumen	104.000.000	72 Dokumen	495.188.500	BPSDM	Hajimena		
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			8 Dokumen	32.000.000	8 Dokumen	32.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	33.280.000	8 Laporan	34.611.200	16 Laporan	131.891.200	BPSDM	Hajimena		
			- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat daerah	-			20 Dokumen	20.612.000	20 Dokumen	20.612.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	22.500.000	20 Laporan	23.400.000	40 Laporan	87.124.000	BPSDM	Hajimena		
			2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100%	11.911.590.000	100%	13.003.440.292	Persentase kesesuaian dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	13.134.974.695	100%	13.660.373.683	100%	51.710.378.670	BPSDM	Hajimena		
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-			12 bulan	11.861.590.000	12 bulan	12.953.440.292	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang	13.082.974.695	85 Orang	13.606.293.683	339 Orang	51.504.298.670	BPSDM	Hajimena		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) (SESUAI KEPENDAGRI 050_5889 TH 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2020		2021		2022			2023		2024		TARGET	RP.			TARGET	RP.
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.
1	2	3	4	5	6	7						8				9	10					
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen keuangan akhir tahun	-			1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	31.200.000	1 Laporan	32.448.000	2 Laporan	123.648.000	BPSDM	Hajimena		
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	-			18 Dokumen	20.000.000	18 Dokumen	20.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Laporan	20.800.000	18 Laporan	21.632.000	36 Laporan	82.432.000	BPSDM	Hajimena		
			3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen Administrasi Barang Milik daerah Perangkat Daerah	-			100%	27.670.500	100%	27.670.500	Persentase kesesuaian dokumen Administrasi Barang Milik daerah Perangkat Daerah	100%	30.820.000	100%	34.785.200	100%	120.946.200	BPSDM	Hajimena		
			- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD SKPD	-			2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	0	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0		0		12.000.000	BPSDM	Hajimena		
			- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Asset	-			2 Dokumen	15.670.500	2 Dokumen	15.670.500	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	17.500.000	3 Laporan	20.000.000	6 Laporan	68.841.000	BPSDM	Hajimena		
			- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	-					1 Dokumen	12.000.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13.320.000	1 Laporan	14.785.200	2 Laporan	40.105.200				
			4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100%	282.741.500	100%	282.741.500	Persentase kesesuaian dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	295.000.000	100%	317.500.000	100%	1.177.983.000	BPSDM	Hajimena		
			- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian	-			9 Dokumen	32.598.500	9 Dokumen	32.598.500	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9 Dokumen	35.000.000	9 Dokumen	37.500.000	36 Dokumen	137.697.000	BPSDM	Hajimena		
			- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	-			95 orang	250.143.000	95 orang	250.143.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	105 orang	260.000.000	110 orang	280.000.000	420 Orang	1.040.286.000	BPSDM	Hajimena		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) (SESUAI KEPENDAGRI 050_5889 TH 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2020		2021		2022			2023		2024		TARGET	RP.			TARGET	RP.
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.
1	2	3	4	5	6	7						8				9	10					
			5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100%	3.873.262.600	100%	3.414.354.200	Persentase peningkatan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.994.432.412	100%	3.365.490.017	100%	13.647.539.229	BPSDM	Hajimena		
			- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Peralatan Listrik	-			12 bulan	52.040.000	12 bulan	52.040.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	57.500.200	12 Paket	65.000.000	24Paket	226.580.200	BPSDM	Hajimena		
			- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-			12 bulan	64.510.000	12 bulan	64.510.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	70.000.000	12 Paket	71.400.000	24Paket	270.420.000	BPSDM	Hajimena		
			- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-			12 bulan	30.856.000	12 bulan	30.856.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	35.000.000	12 Paket	37.500.000	24Paket	134.212.000	BPSDM	Hajimena		
			- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Cetak dan Penggandaan	-			12 bulan	47.304.000	12 bulan	47.304.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	12 Paket	55.000.000	24Paket	199.608.000	BPSDM	Hajimena		
			- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan buku bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-			142 Buku	28.400.000	142 Buku	20.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	200 Dokumen	22.200.000	200 Dokumen	25.000.000	400 Dokumen	95.600.000	BPSDM	Hajimena		
			- Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material	-			12 bulan	114.682.000	12 bulan	114.682.000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	120.000.000	12 Paket	130.000.000	24Paket	479.364.000	BPSDM	Hajimena		
			- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan Makan dan Minum	-			12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	8 Laporan	65.000.000	8 Laporan	70.000.000	16 Laporan	255.000.000	BPSDM	Hajimena		
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi	-			12 bulan	3.462.473.000	12 bulan	3.011.964.600	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157 Laporan	2.559.732.212	162 Laporan	2.893.590.017	319 Laporan	11.927.759.829	BPSDM	Hajimena		
			- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penatausahaan arsip SKPD	-			12 bulan	12.997.600	12 bulan	12.997.600	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Paket	15.000.000	12 Paket	18.000.000	24 Paket	58.995.200	BPSDM	Hajimena		
			6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase kuantitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang ditingkatkan	-			100%	777.066.500	100%	1.097.322.000	Persentase kuantitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang ditingkatkan	100%	584.818.500	100%	2.826.811.240	100%	5.286.018.240	BPSDM	Hajimena		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pengadaan Kendaraan Dinas						1 unit	500.494.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 unit	400.000.000	1 unit	900.494.000	BPSDM	Hajimena		
			- Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebeleur	-			100 unit	149.380.000	80 unit	208.160.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	185.000.000	2 Paket	390.000.000	3 Paket	932.540.000	BPSDM	Hajimena		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) (SESUAI KEPENDAGRI 050_5889 TH 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2020		2021		2022			2023		2024		TARGET	RP.			TARGET	RP.
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.
1	2	3	4	5	6	7						8				9	10					
			- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-			245 unit	523.686.500	30 unit	296.850.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 unit	299.818.500	150 unit	1.111.811.240	525 unit	2.232.166.240	BPSDM	Hajimena		
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-			1 unit	104.000.000	1 unit	91.818.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	100.000.000	1 unit	925.000.000	4 unit	1.220.818.000	BPSDM	Hajimena		
			7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100%	1.260.464.100	100%	1.214.464.100	Persentase peningkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.248.657.600	100%	1.291.600.000	100%	5.015.185.800	BPSDM	Hajimena		
			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-			12 bulan	642.940.000	12 bulan	642.940.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	668.657.600	12 Laporan	700.000.000	24 Laporan	2.654.537.600	BPSDM	Hajimena		
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa Pelayanan Umum Kantor	-			12 bulan	617.524.100	12 bulan	571.524.100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	580.000.000	12 Laporan	591.600.000	24 Laporan	2.360.648.200	BPSDM	Hajimena		
			8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang ditingkatkan	-			100%	488.524.000	100%	468.489.000	Persentase kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang ditingkatkan	100%	570.000.000	100%	889.809.400	100%	2.416.822.400	BPSDM	Hajimena		
			- Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-			12 bulan	121.604.000	12 bulan	121.604.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	135.000.000	6 Unit	150.309.400	12 Unit	528.517.400	BPSDM	Hajimena		
			- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-			12 bulan	151.170.000	12 bulan	151.170.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	550 Unit	210.000.000	560 Unit	210.000.000	1110 Unit	722.340.000	BPSDM	Hajimena		
			- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-			12 bulan	215.750.000	12 bulan	195.715.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 Unit	225.000.000	30 Unit	529.500.000	60 Unit	1.165.965.000	BPSDM	Hajimena		
			II Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100	100%	2.669.322.000										100%	2.669.322.000	BPSDM	Hajimena		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) (SESUAI KEPENDAGRI 050_5889 TH 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2020		2021		2022			2023		2024		TARGET	RP.			TARGET	RP.
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.
1	2	3	4	5	6	7						8				9	10					
			1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 Bulan	100%	675.803.200										100%	675.803.200	BPSDM	Hajimena		
			2 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi	Layanan administrasi keuangan	48 Bulan	100%	404.158.800										100%	404.158.800	BPSDM	Hajimena		
			3 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Layanan Kebersihan Kantor	48 Bulan	100%	186.450.000										100%	186.450.000	BPSDM	Hajimena		
			4 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Pengadaan ATK	48 Bulan	1969 Buah	30.756.100										1969 Buah	30.756.100	BPSDM	Hajimena		
			5 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	48 Bulan	7886 Lembar	39.195.500										7886 Lembar	39.195.500	BPSDM	Hajimena		
			6 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48 Bulan	2067 Unit	64.310.000										2067 Unit	64.310.000	BPSDM	Hajimena		
			7 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	48 Bulan	1733 Buah	148.830.400										1733 Buah	148.830.400	BPSDM	Hajimena		
			8 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	48 Bulan	5550 Buku	81.000.000										5550 Buku	81.000.000	BPSDM	Hajimena		
			9 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Layanan Makan dan Minum	48 Bulan	58 Kali	69.780.000										58 Kali	69.780.000	BPSDM	Hajimena		
			10 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	266 Kali	100 Kali	618.038.000										100 Kali	618.038.000	BPSDM	Hajimena		
			11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga PTHL	-	15 Orang	351.000.000										15 Orang	351.000.000	BPSDM	Hajimena		
			III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor	70%	100%	1.555.235.000										100%	1.555.235.000	BPSDM	Hajimena		
			1 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	461 Unit	225 Unit	1.046.617.000										225 Unit	1.046.617.000	BPSDM	Hajimena		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) (SESUAI KEPENDAGRI 050_5889 TH 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2020		2021		2022			2023		2024		TARGET	RP.			TARGET	RP.
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.
1	2	3	4	5	6	7						8				9	10					
			2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	46 Bulan	37 Unit	234.800.000										37 Unit	234.800.000	BPSDM	Hajimena	
			3	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	48 Bulan	6 Unit	149.468.000										6 Unit	149.468.000	BPSDM	Hajimena	
			4	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	45 Bulan	252 Unit	124.350.000										252 Unit	124.350.000	BPSDM	Hajimena	
			IV Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah	100	100%	570.883.000										100%	570.883.000	BPSDM	Hajimena	
			1	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan	jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	151 Orang	90 Orang	525.000.000										90 Orang	525.000.000	BPSDM	Hajimena	
			2	Kegiatan Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Anjab, ABK, Evaluasi Jabatan dan lain-lain	-	20 Dokumen	45.883.000										20 Dokumen	45.883.000	BPSDM	Hajimena	
			V Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah		Persentase Kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	100%	100%	677.264.000										100%	677.264.000	BPSDM	Hajimena	
			1	Kegiatan Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	55 Dokumen	20 Dokumen	36.264.000										20 Dokumen	36.264.000	BPSDM	Hajimena	
			2	Kegiatan Penyusunan Laporan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	55.000.000										12 Dokumen	55.000.000	BPSDM	Hajimena	
			3	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	60 Dokumen	18 Dokumen	245.000.000										18 Dokumen	245.000.000	BPSDM	Hajimena	
			4	Kegiatan Pengembangan e-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	Implementasi aplikasi e-Government dan pameran	-	2 Paket	320.000.000										2 Paket	320.000.000	BPSDM	Hajimena	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) (SESUAI KEPMENDAGRI 050_5889 TH 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2020		2021		2022			2023		2024		TARGET	RP.			TARGET	RP.
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.
1	2	3	4	5	6	7						8		9	10							
			5 Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	-	50 Dokumen	21.000.000									50 Dokumen	21.000.000	BPSDM	Hajimena			
					JUMLAH		15.000.000.000		35.502.607.900		32.779.274.992		33.094.383.207		38.042.740.740		153.911.046.839					

Hajimena,

2021

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Dr. Hi. SENEN MUSTAKIM, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19680602 199303 1006

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung secara spesifik memiliki tanggung jawab terkait dengan pencapaian Misi Kedua yaitu “Mewujudkan *“good governance”* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik, dimana prioritas utama adalah Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi, yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai reformasi birokrasi yang dicapai Pemerintah Provinsi Lampung sebagai indikatornya. Secara operasional, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung mengacu pada strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka mendukung peningkatan kualitas reformasi birokrasi, melalui penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik (prima) kepada masyarakat.

Untuk itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan berupaya membangun kompetensi sumber daya aparatur Pemerintah Provinsi Lampung yang profesional melalui pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi aparatur. Disamping itu untuk mendukung kualitas alumni diklat yang dihasilkan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung juga berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat/pengembangan kompetensi yang dilakukan. Kedua hal tersebut menjadi indikator kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun kedepan.

Secara rinci penetapan indikator kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 7.1 INDIKATOR KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	7,65%	12,54%	20,28%	25,34%	32,39%	38,30%	48,40%	48,40%
2.	Nilai Akreditasi	B	B	B	B	A	A	A	A

BAB VIII. PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan urusan pemerintah fungsi penunjang untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Lampung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi Lampung.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama bahwa adalah bahwa Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Lampung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan/atau target kinerja sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LkjIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung ini.

Hajimena,

2021

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**



Dr. Hi. SENEN MUSTAKIM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680602 199303 1 006